

JURNAL BRIEF

AKSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL
ANTIKORUPSI INDONESIA

Maret 2015



Komunitas Petani Batang yang tergabung dalam Omah Tani Batang menggelar aksi ruwatan di gedung KPK pada Sabtu malam, 7 Februari 2015. Sekitar 200 orang petani dari Batang mendatangi gedung KPK untuk menggelar aksi dukungan terhadap KPK. Dalam aksi ini mereka menggelar beberapa acara tradisional diantaranya ruwatan, tarian Topeng Ireng, membatik dan lain-lain. Koordinator aksi Handoko Wibowo mengatakan, bagi kami, KPK sangat luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi selama ini. Banyak kasus besar yang ditangani KPK sehingga banyak uang rakyat yang diselamatkan.

Setelah menggelar aksi di Sabtu malam, keesokan harinya rencananya mereka akan melakukan aksi di Bundaran HI dengan berkonvoi bersama-sama. Namun karena hujan yang mengguyur Jakarta dipagi hari, mereka memutuskan untuk melanjutkan aksi di depan gedung KPK. Mereka melanjutkan aksi dengan melukis dan membatik bertemakan antikorupsi. Dalam aksi lukisannya, mereka membuat lukisan yang menggambarkan tentang perkelahian cicak dengan buaya. Di bawah cicak dan buaya, ada seekor babi mengenakan kemeja dan dasi sedang tertawa. Lukisan itu seolah-olah menggambarkan bahwa dibalik persetujuan antara KPK dan Polri, ada pihak yang memanfaatkan situasi tersebut.

10 Februari 2015



Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar acara nonton film bertema antikorupsi di halaman gedung KPK pada 10 dan 11 Februari 2015. Acara ini merupakan bagian dari serangkaian acara yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendukung KPK. Beberapa jurnalis yang sedang berada di KPK dan staff KPK yang hendak pulang kantor menyempatkan diri untuk menonton film antikorupsi tersebut. Ada 3 film yang diputar yaitu film "Kemijen Bergerak" yang bercerita tentang bagaimana masyarakat Kemijen dikota semarang melakukan audit sosial terhadap proyek MCK, kemudian ada film KvsK yang merupakan omnibus (kumpulan film pendek). Film tersebut bercerita tentang perilaku korupsi yang terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Film tersebut merupakan produksi Cangkir kopi dan Transparency International Indonesia.

Dihari kedua, acara dilanjutkan dengan pemutaran film layar lebar "Sebelum Pagi Terulang Kembali". Film yang sempat meraih penghargaan sebagai film bioskop terfavorit dalam ajang Apresiasi Film Indonesia (AFI) ini diproduksi oleh Cangkir Kopi dan Transparency Internatinal Indonesia. Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto ikut menyaksikan film tersebut bersama staff KPK dan para Jurnalis.

15 Februari 2015



Banyak cara untuk melakukan dukungan terhadap gerakan antikorupsi. Isu kriminalisasi terhadap KPK mendapat perhatian khusus pada masyarakat sipil dari berbagai kalangan. Tak terkecuali para komunitas kreatif. Mereka mengadakan aksi dukungan terhadap KPK dengan melakukan aksi yang cukup unik, yaitu dengan menggelar sablon gratis antikorupsi di area Car Free Day (CFD) Bundaran HI pada Minggu 15 Februari 2015. Aksi inipun menyedot perhatian publik, tak sedikit orang yang rela membuka bajunya untuk disablon bahkan ada yang sengaja membeli baju baru untuk disablon.

16 Februari 2015



Massa yang tergabung dalam gerakan SAPU KORUPTOR (Satu Padu lawan Koruptor) menggelar aksi di depan Balaikota DKI Jakarta pada 16 Februari 2015. Aksi ini merupakan keprihatinan dari masyarakat sipil atas pelemahan dan kriminalisasi terhadap KPK. Masyarakat yang terdiri dari pegiat antikorupsi, rakyat miskin kota, petani, nelayan, buruh, mahasiswa, seniman, tokoh masyarakat, aktivis hukum dan HAM dan seluruh lapisan masyarakat anti korupsi menyatakan bahwa Indonesia Darurat Korupsi dan menyerukan agar seluruh masyarakat melakukan perlawanan balik terhadap koruptor.

Aksi tersebut juga serentak dilakukan di 26 kota di Indonesia diantaranya: Padang, Makassar, Surabaya, Bandung, Lampung, Medan, Yogyakarta, Karawang, Bulukumba, Palopo, Semarang, Palu, Kupang, Manado, Kendari, Bogor, Jakarta, Jayapura, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Enrekang, Samarinda. Dalam aksinya Gerakan Sapu Koruptor menuntut agar Presiden RI Jokowi mendengar suara rakyatnya untuk berani secara tegas melakukan tindakan-tindakan :

1. Menghentikan seluruh proses kriminalisasi Komisioner KPK, Staff KPK, dan pegiat Anti Korupsi.
2. Membatalkan Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
3. Menolak Pencalonan Komjen Budi Waseso sebagai calon kapolri karena dugaan melanggar hukum melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap Komisioner KPK Bambang Widjajanto.
4. Memilih Kapolri yang memiliki integritas dan bebas korupsi melalui KPK, PPATK dan Uji Publik.

Setelah aksi di Balaikota, Gerakan SAPU Koruptor kemudian melakukan aksi lanjutan di depan geng KPK hingga malam hari.

19 Februari 2015



Setelah lama ditunggu, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan sikap terkait pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sayangnya, Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan sepatah kata pun atau setidaknya menunjukkan itikad untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK. Menyikapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat sipil menggelar Konferensi pers pada 19 Februari di Gedung KPK.

Dalam konferensi pers tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil antikorupsi mendesak agar:

1. Presiden segera mengambil tindakan yang jelas dan terang-benderang dengan menghentikan semua proses kriminalisasi yang terus-menerus terjadi terhadap KPK.
2. Presiden dalam pengajuan calon Kapolri baru harus dititikberatkan pada penilaian terhadap aspek integritas dan bebas korupsi. Dengan itu, pelibatan KPK dan PPATK menjadi sebuah keharusan.
3. Presiden memerintahkan pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri untuk melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh Kepolisian. Langkah itu mesti ditindaklanjuti dengan mencopot semua aktor-aktor yang berperan dalam pelumpuhan KPK, terutama dengan mencopot dan menonaktifkan Kabareskrim Komjen (Pol) Budi Waseso.
4. Presiden mendorong Plt. Pimpinan KPK agar melakukan deklarasi integritas dan deklarasi bebas konflik kepentingan. Konflik kepentingan terutama dalam kapasitasnya sebelum menjabat Plt. Pimpinan KPK, baik potensi konflik kepentingan terkait afiliasi politik, pekerjaan, bisnis, keluarga, dan sebagainya.
5. KPK terus mengusut perkara Komjen (Pol) Budi Gunawan dan perkara-perkara korupsi lainnya.

26 Februari 2015



Transparency International Indonesia pada 26-27 Februari menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Gerakan Antikorupsi di Depok - Jawa Barat. Sebanyak 125 individu dari 85 organisasi dari Aceh sampai Papua menyoroti kelemahan KPK, goyahnya sendi-sendi penegakan hukum dan kenegarawanan, serta ancaman terhadap agenda politik pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokowi dan Kabinet Kerja.



Kami semua sangat beruntung bisa berbagi pengalaman dan pemikiran dalam situasi darurat pemberantasan korupsi bersama Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto, Sekjen TII Dadang Trisasongko, Direktur Kemitraan Monica Tanuhandaru dan Budayawan Prof Mochtar Pabottingi.

Acara tersebut menghasilkan beberapa rencana strategis yang dapat dijalankan pada jangka pendek (3 bulan kedepan).

27 Februari 2015



Peserta Konsolidasi Nasional Gerakan Antikorupsi dari Aceh sampai Papua bertemu dengan pimpinan dan Plt. Pimpinan KPK pada 27 Februari 2015. Harapannya sangat besar ke Pimpinan dan Plt Pimpinan saat ini, namun kami menyampaikan secara jelas bahwa dukungan itu bukan tanpa syarat. Para Komsioner dalam sisa masa jabatan 10 bulan ke depan harus bisa memberi bukti, tidak hanya bersandar janji, klaim apalagi bikin statemen yang tidak jelas di media. Mereka harus buktikan jika menjaga independensi KPK dalam mengusut kasus-kasus besar, termasuk Rekening Gendut dan kasus BG. Mereka juga jangan mengambil tindakan dan sikap yang dapat memisahkan KPK dari dukungan publik. Yg akan menempatkan KPK sebagai sasaran tembak oligarkhi dan koruptor di tengah minimnya dukungan politik dan proteksi hukum atas diri dan pekerjaan mereka.

Komisioner jelas menyadari bahwa konflik dan pelemahan KPK yang terjadi saat ini tidak lepas dari upaya KPK untuk memperbaiki tata kelola sektor-sektor yang syarat kepentingan oligarkhi: minerba, migas, kejahatan perbankan, pajak, dll. Komisioner jg memahami bahwa independensi dan kinerjalah yg akan membuat lembaga ini dapat bertahan dari akuisisi bahkan likuidasi. Karena itu, masyarakat sipil akan memasang mata dan terus menaruh perhatian atas perkembangan proses pelemahan KPK dan potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

4 Maret 2015



Foto Dok Liputan6.com

Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi dari Aceh sampai Papua dan Gerakan SAPU Koruptor menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 4 Maret 2015. Mereka mengecam sikap pelaksana tugas lembaga antirasuah yang melimpahkan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

"Pelimpahan kasus ini menunjukkan pimpinan KPK berpikir sangat pragmatis, tidak independen, tidak berani dalam menuntaskan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik," ujar Alghiffari Aqsa, Anggota Koalisi dari LBH Jakarta.

Dalam aksinya, mereka mengenakan baju hitam-hitam dan menggotong simbol kuda troya yang terbuat dari kayu dan kertas. Dalam kuda troya itu ditemplei gambar wajah pelaksana tugas pimpinan KPK, Taufiequrrachman Ruki. Selain simbol Kuda Troya, mereka juga membawa karangan bunga yang bertuliskan "Turut berduka cita atas wafatnya KPK oleh Plt dan Pimpinan KPK".

Koalisi menilai bahwa sejak adanya Plt Pimpinan KPK telah merusak keberanian dan semangat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu Koalisi menyatakan Mosi tidak percaya terhadap Plt Pimpinan KPK khususnya Taufiequrrachman Ruki cs yang telah membunuh semangat pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik terhadap KPK saat ini.

Koalisi memberikan dukungan kepada pegawai KPK yang telah menyatakan sikap kekecewaannya terhadap keputusan-keputusan pimpinan KPK. Bentuk protes pegawai KPK merupakan bentuk wujud keberanian dalam pemberantasan korupsi.